

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM PENGUPAHAN BURUH
(Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Mutiara Latifah
NPM : 1721030314**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BURUH

(Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**MUTIARA LATIFAH
NPM: 1721030314**

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Bekerja menjadi buruh di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) merupakan pekerjaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Baru. Dalam perjanjian kerja di Rumah Pemotongan Ayam ini dilakukan secara lisan dan tertulis yakni pekerja/buruh diberikan upah setiap dua minggu sekali. Pekerja/buruh tersebut diberikan upah dengan hitungan perekor ayam yang dikerjakan dan upahnya tersebut sebesar RP 800,00. Namun, pemberian upah tidak langsung diberikan oleh pemilik perusahaan kepada pekerja/buruh, akan tetapi melalui mandor atau kepala buruh. Sehingga terjadinya pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan kepala buruh sebesar Rp 10.000,00 hingga Rp 25.000,00 kepada pekerja/buruh.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh yang dilakukan di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dimana pada kesepakatan di awal pekerja/buruh diberi upah sebesar Rp 800,00 per ekor ayam. Akan tetapi pada prakteknya pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang sesuai karena adanya pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan oleh kepala buruh kepada pekerja/buruh tersebut. Hal ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat dalam upah mengupah yang berupa keridhaan dari kedua belah pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Latifah

NPM : 1721030314

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2021

Penulis



Mutiara Latifah

NPM. 1721030314



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Lei. Kol. H. Saratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan
Buruh (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa
Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten
Lampung Selatan)**

Nama : **Mutiara Latifah**

NPM : **1721030314**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunafasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munafasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Eko Hidayat, S.sos, M.H.

NIP.19708262003121002

NIP.19751230200312002

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I-Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Mutiara Latifah NPM1721030314** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Selasa, 26 Oktober 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Rolf Nur Edi, S.Ag. M.H.

Penguji II : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji III : Eko Hidayat, S.sos, M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asy-Syu'ara: 183)

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur saya sembahkan kepadamu Allah SWT, atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku sehingga menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan segenap hati dan jiwa raga skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Papi H. Sulaiman Ali S.E dan Mami Hj. Miskatul Aini yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, yang memberikan cinta kasih dan sayang tiada henti-hentinya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini, yang memberikan nasihat-nasihat untuk setiap perjalanan dan prestasiku, serta selalu mendoakan setiap saat dalam hidupku hingga saat ini. Terimakasih banyak atas segala yang kalian berikan dalam hidupku, kalian adalah orang tuaku yang terbaik di dalam hidupku.
2. Kakak-kakak saya yang tercinta Novita Sari S.E, Muhammad Fadhlih S.I.Kom, Muhammad Faizun S.Si yang selalu membantu dan memberikan dukungan penuh dalam kondisi senang maupun susah.
3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mutiara latifah, dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1997 di Bandar Lampung. Merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Sulaiman Ali dan Ibu Miskatul Aini. Pendidikan di mulai dari :

1. TK Dwi Tunggal, pada tahun 2003 sampai tahun 2004.
2. SD Negeri 2 Rawa Laut, pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010 .
3. SMP Negeri 5 Bandar Lampung, pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 10 Bandar Lampung, pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Srata Satu (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Skripsi ini juga dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas kampus.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I dan ibu Juhratul Khulwa selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far S.Ag. M.H selaku pembimbing I dan bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran sehingga berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para Narasumber dan Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.

7. Sahabat-sahabat yang tersayang Angel, Nirda, Desi, Mega, Weni, Anna, Yeriska, Dhea, Nadea dan Vania yang telah ikut membantu serta selalu menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Teman- Teman seperjuangan Jurusan Muamalah Fakultas Syariah angkatan 2017 khususnya teman-teman Muamalah J yang saling menyemangati.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikian kata pengantar ini dibuat, jika ada kesalahan kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran dengan senang hati demi untuk membangun agar menjadi lebih baik.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2021
Penulis

Mutiara Latifah
NPM. 1721030314

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
I. Metode Penelitian.....	8
J. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam	13
1. Definisi Upah	13
2. Dasar Hukum Upah	15
3. Rukun dan Syarat Upah	18
4. Macam-Macam Upah	24
5. Waktu Pembayaran Upah	25
6. Prinsip-Prinsip Pengupahan.....	27

7. Pembatalan dan Berakhirnya Upah.....	30
B. Buruh (Tenaga Kerja).....	32
1. Pengertian Buruh (Tenaga Kerja)	32
2. Bentuk-Bentuk Buruh	35
3. Upah Buruh (Tenaga Kerja)	37
4. Sistem Pembayaran Upah Pekerja/Buruh	38
5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak.....	41
6. Perjanjian dan Unsur Perjanjian kerja.....	42
7. Syarat-Syarat Perjanjian kerja	44

BAB III GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan	47
1. Sejarah Perusahaan	47
2. Visi dan Misi Perusahaan	48
3. Lokasi Penelitian	48
4. Struktur Pengurus dan Organisasi.....	48
5. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	50
6. Jam Kerja.....	51
B. Sistem Pengupahan Buruh Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sistem Pengupahan Buruh Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel Besaran Upah Pekerja Yang Menerima Upah Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru 66

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Struktur Organisasi Perusahaan 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal Lampung Selatan

Lampiran 2. Surat Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul.

Adapun judul proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** adapun istilah yang akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam adalah kegiatan meninjau pendapat/pandangan yang telah ditetapkan dalam hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.¹

2. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan adalah kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh pemberi kerja kepada pekerja.²

3. Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja.³

4. Rumah Pemotongan Ayam

Rumah Pemotongan Ayam adalah salah satu komponen hilir usaha perunggasan. Usaha rumah pemotongan ayam ini mempunyai pengertian yaitu suatu proses kegiatan untuk merubah ayam hidup menjadi bentuk karkas yang siap dipasarkan atau dimasak (*ready to cook*).

¹ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

² Sandra Dyana, *Cara Cepat Menguasai Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 149.

³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2003), 13.

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah bagaimana sistem pengupahan yang terjadi antara pekerja buruh dan pemilik perusahaan Rumah Pemotongan Ayam Di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan menurut hukum Islam.

B. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbulah hubungan hak dan kewajiban. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut hukum muamalah.⁴ Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah sistem kerjasama dan pengupahan.

Upah mengupah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong. Upah mengupah dalam Islam biasa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah:2)⁵

⁴ Rahmat Syafe'i, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII press, 2000), 7.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000), 422.

Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktivitas bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (merugikan salah satu pihak). Namun tentang hal pembayaran upah, Nabi SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

قَبْلَ أَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْإِجِيرَ آجِرَ
يَجِفُّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberi jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan di tunda-tunda, bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya, karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.

Bekerja menjadi buruh di Rumah Pemotongan Ayam merupakan pekerjaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa Talang Baru. Rumah Pemotongan Ayam (RPA) merupakan salah satu usaha perunggasan yang merubah ayam hidup menjadi ayam yang siap dipasarkan atau dimasak (*ready to cook*). Perjanjian kerja di Rumah Pemotongan Ayam ini dilakukan secara tertulis antara pemilik perusahaan dengan pekerja/buruh. Dalam perjanjian tersebut pekerja/buruh diberi upah setiap dua minggu sekali.

Dalam sistem pengupahan tersebut pekerja/buruh diberi upah dengan hitungan perekor ayam yang dikerjakan/diolah oleh

⁶ Muhammad Bin Yazis Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 11, No. 2443 (*Dar Ilya 'Al-Kutub Al- 'Arabiyah*, 2009), 816.

para buruh. Dalam satu ekor ayam tersebut biasanya diberi upah Rp800,00. Sebagai contoh, apabila dalam dua minggu tersebut pekerja/buruh dapat mengerjakan 625 ekor ayam maka mereka akan diberi upah sebesar Rp500.000,00. Akan tetapi, dalam pemberian upah tersebut terdapat suatu masalah yaitu berupa potongan upah sebesar Rp10.000,00 hingga Rp25.000,00 dari setiap buruh yang mengakibatkan pekerja/buruh tidak menerima upah penuh dari pemilik perusahaan.

Pemotongan upah tersebut tidak dijelaskan dalam perjanjian awal, sehingga pemotongan ini dilakukan secara sepihak. Dalam hal ini, ditemukan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak menerima atas perjanjian yang dilakukan karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena dalam prakteknya sistem pengupahan yang terjadi syaratnya masih belum terpenuhi meskipun rukun akad *al-ijarah* telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu pembayaran upah yang dipotong secara sepihak dan upah yang didapat tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

2. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar

penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan upah pekerja tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan peneliti. Maka suatu informasi dilapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan. Fokus penelitian pada judul ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan buruh pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis signifikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan manfaat keilmuan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan” sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil- hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyangkut sistem pengupahan buruh yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau gharar yang dalam Islam dilarang keberadaanya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.⁷

⁷ Siti Maesaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*” (untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), 11.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saeful Rozak (2016), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan upah dengan sistem royongan diperbolehkan dalam hukum Islam. Meskipun pembayaran upah mengalami penundaan hingga akhir tahun namun buruh merasa ikhlas karena penundaan upah ini dilakukan atas dasar saling tolong- menolong antara buruh dengan petani.⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Fadhilah (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggukkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.⁹

Setelah mengamati dari penelitian- penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan belum pernah diteliti. Walaupun penelitian- penelitian diatas sama- sama meneliti tentang upah, namun penelitian yang penulis mempunyai perbedaan yakni dalam sistem pengupahan dan tempat lokasi yang akan penulis jadikan objek penelitian berbeda dengan objek- objek penelitian diatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan wawasan untuk pembaca terhadap sistem pengupahan buruh secara borongan di Rumah Pemotongan Ayam.

⁸ Muhammad Saeful Rozak, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Krilis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016), 14.

⁹ Nurul Fadhilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak*” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 7.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹¹ Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomena- fenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.¹³ Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana sistem pengupahan buruh di Rumah Pematangan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

¹² Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.¹⁴ Sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan pekerja buruh di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Data Sekunder, adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, dan dokumen- dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil membaca buku- buku, dokumentasi atau literatur lainnya yang menunjang permasalahan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 123 orang, yang terdiri dari pemilik perusahaan, manager, 3 mandor, 118 pekerja/buruh.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁶ Dengan adanya sampel ini, maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29.

¹⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

¹⁶ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

15 orang, yang terdiri dari 10 pekerja buruh, 3 mandor, 1 manager dan 1 pemilik perusahaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik dan pekerja buruh di Rumah Pematangan Ayam tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya sistem pengupahan buruh di Rumah Pematangan Ayam Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁷ Dalam proses editing ini dilakukan untuk mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*Systematizing*)

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengelolah menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa.

Data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan- penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisis dapat memperoleh jawaban yang sebenarnya.

¹⁷ Bagong Suryanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 93.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan dari judul, latar belakang masalah, batasan- batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang: pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam- macam upah, waktu pembayaran upah, pembatalan dan berakhirnya upah, serta sistem pembayaran upah.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, serta pelaksanaan sistem pengupahan buruh secara borongan.

BAB IV. PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis sistem pengupahan buruh di Rumah Pemotongan Ayam dan analisis hukum Islam tentang sistem pengupahan buruh di Rumah Pemotongan Ayam.

BAB V. KESIMPULAN

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Definisi *Ujrah* (Upah)

Kajian hukum Islam (fiqh) membahas masalah upah dan perburuhan dalam satu bagian yang disebut dengan *al-ujrah*. *Al-Ujrah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Menurut MA. Tihami, *al-ujrah* (upah-mengupah) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.¹⁸

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ujrah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*.¹⁹

Sedangkan secara istilah *ujrah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Oleh karenanya, Hanifah mengatakan bahwa *ujrah* merupakan akad atas manfaat disertai imbalan.²⁰

Upah secara garis besar dapat dikategorikan sebagai:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2011), 167.

¹⁹ A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010), 145.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

Pengertian upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atau jasanya sesuai perjanjian. Maksudnya adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.²¹ Hal-hal yang terkait dengan upah adalah sebagai berikut:

1. Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
2. Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
3. Upah lembur merupakan upah paling rendah yang menurut Undang- Undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
4. Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
5. Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.
6. Upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut Undang- Undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

Menurut istilah, para ulama mendefinisikan beberapa pendapat tentang *ujrah*, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Menurut ulama Hanafi *ujrah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

²¹ Al- Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), 361.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

- b. Menurut ulama Syafi'i *ujrah* adalah suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan jelas.
- c. Menurut ulama Maliki dan Hanabilah *ujrah* adalah suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.
- d. Menurut Sayyid Sabiq *ujrah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- e. Menurut Idris Ahmad mengatakan bahwa *ujrah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ujrah* upah mengupah adalah pengambilan manfaat tenaga ataupun kekuatan seseorang dengan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum *al-ujrah* terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

1. Al- Qur'an Surat Al-Talaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَرْضَعُ لَهُ ۚ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (QS. At- Talaq: 6)²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai raj’i. Kemudian dalam Al- Qur’an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah.

2. Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرُّهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* (Q.S. Al-Qashash:26)²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 412

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 388.

Ayat di atas menjelaskan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh ulama Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”(Q.S. An-Nahl: 90)²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hambanya untuk berlaku adil, yaitu bersikap tengah- tengah dan seimbang, serta dianjurkan berbuat baik.

4. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا إِلَّا جِيرَاجِرُهُ قَبْلَ أَنْ يَحْجَفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 278.

²⁶ Ash Shari' Ani, *Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Berikalah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar gaji atau upah kepada seseorang harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda sehingga dapat mengeratkan silaturahmi atau kerjasama di lain waktu jika dibutuhkan kembali.

5. Hadis Riwayat Bukhari no. 2119:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَا مِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ
(رواه البخار)²⁷ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir berkata: Aku dengar Anas radhiallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari No. 2119)*

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.²⁸

²⁷ Ibid, 295.

²⁸ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: adapun sewa-menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.²⁹

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ujrah* ada (4) empat, yaitu:

a. *A'qid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajir* sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.³⁰

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *Sighat* akad (*sighatul-'aqad*) terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama

²⁹ Chairuman Pasaribu Surwandi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53.

³⁰ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³¹

c. Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam hal sewa-menyewa maupun dalam hal upah-mengupah. Karena *ijarah* tidak sah apabila upah belum diketahui. Dalam pemberian upah terdapat prinsip-prinsip berdasarkan ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan (ditetapkan berdasarkan negosiasi kedua belah pihak), prinsip kebebasan, prinsip pemerataan (mempunyai kesempatan yang sama yang bertujuan tidak adanya ketimpangan upah pada pekerja yang dapat menimbulkan keserakahan dan kecemburuan sosial).³²

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.³³

b. Syarat Upah

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa atau upah-mengupah itu sendiri. Dalam sebuah transaksi, *ujrah* baru dianggap apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana

³¹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, 95.

³² M. Maburri Faozi dan Putri Ingg Rahmianti, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam*, *Al Mustashfa* Vol.4, No.1 (2016), 18-19.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 231.

yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat akad upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Pelaku *ujrah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ujrah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ujrah* harus orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ujrah*. Apabila salah seseorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa: 29)³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan satu sama lainnya atau antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak yang lain.³⁵

3. Objek *al-ijarah* atau *ujrah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* atau *al-ujrah* itu tidak boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4. Objek *al-ujrah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau upah mengupah perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 83.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), 232-233.

objek sewa menyewa dalam contoh diatas termaksud maksiat. Sedangkan dalam kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa atau upah mengupah dalam masalah maksiat tidak boleh”.

5. Objek *al-ujrah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasanny menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* atau *ujrah* ada lima yaitu sebagai berikut.³⁶

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- d. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat upah mengupah tersebut telah terpenuhi, maka akad *ujrah* telah dianggap sah menurut syara'. Sedangkan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka upah mengupah tersebut dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

³⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 170.

4. Macam-Macam Upah Mengupah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), contohnya seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. apabila manfaat itu yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan

musta'jir mendapat tenaga atau jasa dari *mu'ajir*. *Ijarah 'ala al-a' mal* terbagi menjadi dua bagian yaitu:³⁷

- a) *Ijarah* khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b) *Ijarah musytarik* yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan kerjasama dengan orang lain.

5. Waktu Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di Dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.³⁸

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, mazhab Hanafi berpendapat bahwa masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguk, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan

³⁷ Al Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*..., 361.

³⁸ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), 874.

waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.³⁹

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan.

Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Menurut Rasulullah SAW, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْآجِرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁴⁰

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 20.

⁴⁰ Muhammad Bin Yazis Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 11, No. 244*, 816.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah dilarang oleh orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah SAW dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁴¹

6. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*” yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, ada empat makna keadilan yakni:⁴³

Pertama, ‘*adl*’ dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur’an pada Surat An-Nisa ayat 3, 58, dan 129. Kata ‘*adl*’ dengan arti persamaan pada ayat yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak.

⁴¹ *Ibid*, 817.

⁴² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 12-14.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 123.

Kata '*adl* di dalam ayat tersebut adalah yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran Ketuhanan.

Kedua, kata '*adl* dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada satu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan di dalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola sega sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "keadilan ilahi".

Ketiga, kata '*adl* dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Pengertian '*adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

Keempat, kata '*adl* yang diartikan dengan "yang dinisbahkan kepada Allah". Adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya.

Kata adil juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum yang benar. Ini sesuai dengan

tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam dapat diartikan, yakni sebagai berikut:⁴⁴

1. Adil bermakna jelas dan transparan

Maksudnya adalah bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.

3. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni sebagai berikut:⁴⁵

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. Dalam hal ini, kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

⁴⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*..., 174.

⁴⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 86.

2. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Dalam arti lain, jangan mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang diberikan biasanya.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran upah itu sendiri. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

7. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Setiap transaksi dalam *ijarah* atau *ujrah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati bersama, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Menurut Ulama fikih, ada beberapa hal yang dapat berakhirnya akad *ujrah* yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* atau *ujrah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut

⁴⁶ *Ibid*,86.

- mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, sebagai contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau mengebor air bawah tanah sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* atau *al-ujrah* akan menjadi batal dan berakhir apabila dalam hal hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya rumah dan bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan bersama.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.⁴⁸

B. Buruh (Tenaga Kerja)

1. Pengertian Buruh (Tenaga Kerja)

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lain walaupun semuanya termasuk dalam kategori tenaga kerja.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 75-76.

⁴⁹ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 22.

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada di dalam hubungan kerja seperti misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja/buruh. Maka pekerja/buruh dapat dikatakan sebagai tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.⁵⁰ Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi “pekerja/buruh” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyesuaikan dengan istilah “serikat pekerja/serikat buruh” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda istilah buruh hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia barat dikenal dengan istilah *blue collar*. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan halus terutama yang mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberi kedudukan yang di dunia barat dikenal dengan istilah *white collar*.⁵¹

⁵⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 12-13.

⁵¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, 12.

Perbedaan kedua istilah ini terdapat dalam KUH Perdata buku III afdeling 4 yang hanya mengatur soal pelayan dan tukang. Baru pada tanggal 1 Januari 1927 istilah pekerja/buruh halus dan kasar tidak dibedakan dalam buku III bab 7A KUH Perdata diberlakukan bilamana bekerja pada pengusaha atau majikan Eropa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pekerja/buruh Eropa, sedang apabila bekerja sebagai pelayan dan pekerja yang berlaku adalah bab 7 bagian 5 buku III KUH Perdata.

Pembedaan perlakuan peraturan tersebut menunjukkan bahwa KUH Perdata bersifat diskriminatif terhadap pekerja/buruh Indonesia. Guna menghilangkan diskriminasi tersebut maka setelah kemerdekaan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang menegaskan penggunaan bab 7A buku III KUH Perdata sebagai pedoman dalam hubungan kerja antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh bagi seluruh warga Negara Indonesia.⁵²

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh ini selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan dan pengusaha sering seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁵³

⁵² Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 24.

⁵³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

2. Bentuk-Bentuk Buruh

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Buruh terdiri dari beberapa macam bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Buruh harian adalah buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh kasar adalah buruh yang menggunakan tenaganya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.
- c. Buruh pabrik adalah buruh yang bekerja di pabrik.
- d. Buruh tambang adalah orang yang bekerja di perusahaan tambang
- e. Buruh terlatih adalah buruh yang sudah mendapatkan latihan atau pendidikan keterampilan tertentu.
- f. Buruh musiman adalah buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu, misalnya buruh tebang tebu.
- g. Buruh tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.⁵⁴

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun, dalam kultur Indonesia “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan pekerjaannya. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama-sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Menurut klasifikasinya, buruh dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

⁵⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, 132.

- a. Buruh profesional adalah seorang pekerja/buruh yang menggunakan tenaga otak dalam bekerja atau biasa disebut dengan buruh kerah putih.
- b. Buruh kasar biasa adalah seorang pekerja/buruh yang menggunakan tenaga otot dalam bekerja atau biasa disebut dengan buruh kerah biru.⁵⁵

Berdasarkan kalangan buruh itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pekerja/buruh merdeka adalah orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industri kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri.
- b. Para pekerja/buruh sekunder (lapisan kedua) adalah orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sektor perdagangan, serta berbagai layanan lainnya, apakah pekerjaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu atau untuk Negara.⁵⁶

Kedua jenis pekerja ini merupakan sumber kekuatan kerja dalam Negara. Pembahasan tentang hak-hak buruh dalam sistem ekonomi modern hanya lebih difokuskan pada pekerja jenis kedua, yaitu mereka yang tidak bekerja dengan memperoleh bayaran khusus. Pada pekerja jenis kedua ini dapat menetapkan hak-hak yang adil bagi mereka sekaligus menjamin mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan atau layak.

⁵⁵ Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 29.

⁵⁶ Baqir Syarif Al-Qurasyi, *Peran Pekerja Buruh* (Jakarta: Al-Huda, 2007), 179.

3. Upah Buruh (Tenaga Kerja)

Bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi:⁵⁷

1. Upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4. Upah tidak masuk kerja melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
6. Bentuk dan cara pembayaran upah
7. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
8. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
9. Upah untuk pembayaran pesangon
10. Upah untuk perlindungan pajak penghasilan

Di dalam dunia pekerjaan, ada beberapa macam-macam upah yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Upah harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.

b. Upah borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukan untuk pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak.

⁵⁷ *Ibid*, 39.

⁵⁸ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung* (Jakarta: Forum Sahabat, 2012), 3.

c. Upah tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan lainnya. Pembayaran upah tetap hanya diperuntukan bagi pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu atau dalam bahasa sehari-hari adalah pekerja tetap.

d. Upah tidak tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya.

4. Sistem Pembayaran Upah Pekerja/Buruh

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam, yaitu:⁵⁹

a. Sistem upah jangka waktu

Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu. Misalnya upah harian, upah mingguan dan upah bulanan.

b. Sistem upah borongan

Sistem upah ini umumnya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaan dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya. Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:

⁵⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 86.

1) Pekerja/buruh mendapat dorongan untuk bekerja dengan giat

2) Produktivitas makin meningkat

3) Alat-alat produksi akan digunakan secara intensif

Adapun keburukannya dalam sistem pengupahan ini adalah:

1) Pekerja/buruh selalu bekerja secara berlebihan

2) Pekerja/buruh kurang menjaga keselamatannya dan kesehatannya

3) Pekerja/buruh kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar jumlah borongan pekerjaannya

4) upah yang di dapat tidak tetap karena tergantung upah borongan yang dihasilkan. Untuk menampung keburukan sistem upah borongan ini maka diciptakanlah sistem upah gabungan, yaitu gabungan antara upah minimumnya sehari dengan jumlah hasil pekerjaannya sehari.

c. Sistem upah permufakatan

Sistem upah permufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagikan kepada para anggotanya.

d. Sistem skala upah berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upahnya pun akan naik, sebaliknya jika hargaturun maka upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

e. Sistem upah indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

f. Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.

Berkaitan dengan sistem-sistem tersebut Pasal 12 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menentukan, bahwa upah harus ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan. Dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima), atau
- 2) Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi menjadi 21 (dua puluh satu).

Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu harus dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah, yang wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu satu kali atau paling lambat sebulan satu kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Upah pekerja/buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.⁶¹

Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal tempat pembayaran upah tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja/buruh biasanya bekerja.

⁶⁰ Noor Arifin, *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori dan Kasus* (Jakarta: Kencana, 2018), 102.

⁶¹ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 79.

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

a. Kewajiban pemberian kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang di pekerjaan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari permasalahannya. Apakah ada unsur kelalaian atau disengaja maka ia harus bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan atas kelalaian baik dengan cara mengganti atau dengan kebijakan lain.

Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja dengan baik serta berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja yang harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja kepada dirinya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan.

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni:⁶²

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja, sedangkan upah nya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika orang yang bekerja untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka hal tersebut dapat dikatakan batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.

6. Perjanjian dan Unsur Perjanjian Kerja

a. Pengertian perjanjian kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut perjanjian perburuhan (*Arbeidsorvereenkoms*). Pasal 1601 a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah” sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 14 diberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan,

dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.⁶³

b. Unsur-unsur perjanjian kerja

1) Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Suatu perjanjian kerja haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain untuk mengerjakan, pekerjaan tersebut haruslah berpedoman pada perjanjian kerja.⁶⁴

2) Adanya unsur pelayanan

Bahwa dalam melakukan pekerjaan dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja, manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang di perjanjikan.

3) Adanya unsur waktu tertentu

Dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaan pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si majikan dan juga tidak boleh dilakukan seumur hidup. Apabila pekerjaan tersebut dilakukan seumur hidup, maka dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja. Jadi, unsur waktu dimaksud dalam

⁶³ Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan* (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), 69.

⁶⁴ Djumali, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 28.

melakukan pekerjaan harus disepakati jangka waktunya dengan unsur jangka waktu yang dibuat secara tegas.⁶⁵

7. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Pada umumnya setiap perjanjian kerja dibuat untuk memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat-syarat terkait materi atau substansi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat terkait format atau bentuk yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Syarat-syarat perjanjian kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

a. Syarat Materil

Diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUK menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, serta pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Syarat formil

Diatur dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 dan Pasal 57 ayat (1) UUK. Pasal 53 UUK menyatakan bahwa segala hal atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

⁶⁵ *Ibid*, 31.

Pasal 54 ayat (1) UUK menyatakan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
- 2) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh
- 3) Jabatan atau jenis pekerjaan
- 4) Tempat pekerjaan
- 5) Besarnya upah dan cara pembayarannya
- 6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- 7) Dimulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- 8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- 9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Pasal 55 UUK menyatakan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Pasal 57 ayat (1) UUK menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.⁶⁶

⁶⁶ Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*...., 75.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisu Edytus, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat , 2012.
- Al-Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Qurasyi Baqir Syarif, *Peran Pekerja Buruh*, Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Amin A. Ridwan, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010.
- Ani Ash Shari, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010.
- Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arifin Noor, *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori dan Kasus*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Asikin Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asyhadie Zaeni dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budiono Abdul Rahman, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Asy Syifa, 2000.
- Djumali, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dyana Sandra, *Cara Cepat Menguasai Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Faozi M. Mabruuri dan Putri Inggit Rahmiyanti, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Al-Musthafa, 2016.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2010.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2003.
- Muhammad Bin Yazis Majah, Sunan Ibn Majah, Dar Ilya 'Al-Kutub Al- 'Arabiyah, 2009.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rahayu Devi, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Rahman Al-Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.

- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- S Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma Arif, 1987.
- Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shalihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sholihin Ilham Ahmad, *Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryanto Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suwandi Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suwiryo Broto, *Hukum Ketenagakerjaan Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, Surabaya: LaksBang PESSindo, 2017.

Wawancara

Abdul Hakim, Sebagai Buruh Borongan di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 23 April 2021.

Ahmad Kuswandi, Sebagai Buruh Borongan di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 23 April 2021.

Muhammad Najib Effendy, Sebagai Pemilik Perusahaan Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 20 April 2021.

Maysaroh, Sebagai Buruh Borongan di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 23 April 2021.

Nopian Basri, Sebagai Kepala Buruh di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 23 April 2021.

Nur Syikin, Sebagai Buruh Borongan di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 23 April 2021.

Wardati, Sebagai Buruh Borongan di Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, 23 April 2021.

LAMPIRAN











KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

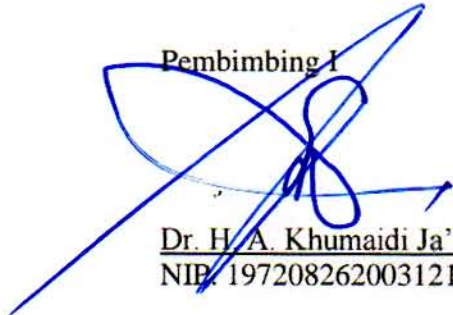
BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mutiara Latifah
Lampiran : 1721030314
Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

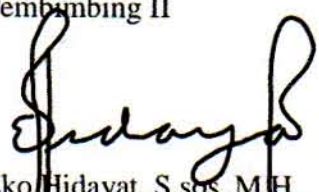
No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	Rabu, 10 Maret 2021	Konsultasi Proposal dengan Pembimbing II: a. Revisi cover proposal b. Revisi penulisan dan footnote c. Revisi Rumusan Masalah		
2.	Kamis, 11 Maret 2021	ACC BAB I Proposal Pembimbing II		
3.	Kamis, 11 Maret 2021	Konsultasi Proposal dengan Pembimbing I: a. Revisi terjemahan arab b. Revisi daftar pustaka		

4.	Jumat, 12 Maret 2021	ACC BAB I Proposal Pembimbing I		
5.	Jumat, 17 September 2021	Konsultasi Skripsi BAB I-V dengan Pembimbing II: a. Revisi persembahan b. Revisi Bab III c. Revisi Bab V		
6.	Selasa, 28 September 2021	ACC Skripsi Pembimbing II		
7.	Selasa, 28 September 2021	Konsultasi Skripsi BAB I-V dengan Pembimbing I: a. Revisi daftar isi b. Revisi abstrak c. Revisi penulisan dan terjemahan arab d. Revisi Bab II, tambah teori tentang buruh		
8.	Jumat, 8 Oktober 2021	ACC Pembimbing I		


Pembimbing I


Dr. H/A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.
 NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Eko Hidayat, S.sos, M.H.
 NIP. 19751230200312002

Lampiran 1. Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal Lampung Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Lubuk 35551
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 800/124 /IV.17/2021

1. Nama : **MUTIARA LATIFAH**

2. Alamat : Gunung Kancil Gg. Menara No. 05 Rt/Rw 003/000 Jagabaya II
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

3. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh
Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa
Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung
Selatan)

4. Tujuan Penelitian : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Tugas
Akhir

5. Lokasi Penelitian : Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung
Selatan

6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : 20 April s.d 20 Juni 2021

7. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah

8. Status Penelitian : -

9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Drs. H. KHADIRUDDIN, MH

10. Anggota Penelitian : **MUTIARA LATIFAH**


11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG/
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 30 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan


MARTONI SANI, S.Sos. MH
NIP. 19691115 196303 1 006

Scanned by TapScanner

Lampiran 2. Surat Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. MUSTAFA KEMALNO. 03 Telp. (0727) 322064-Telp/FAX. (0727) 321500 KALIANDA
REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / PENGEMBANGAN / KKN / KKL Nomor : 070/053/V.06/2021	
DASAR	: 1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.
MEMBACA	: Membaca Surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Nomor : B.862/Un.16/ DS/ PP 009/04/2021 Tgl. 06 April 2021
MEMPERHATIKAN	: Permohonan Rekomendasi Penelitian dan Proposal
MEREKOMENDASIKAN :	
Nama/NPM/NIP	: Mutiara Latifah / 1721030314
Alamat	: Gunung Kancil Jaga Baya Way Halim Bandar Lampung
Pekerjaan	: Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Tujuan	: Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Peserta	: -
Lokasi Penelitian	: Desa Talang Baru, Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
Judul Penelitian	: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru, Sidomulyo Lampung Selatan)"
Waktu Yang diberikan	: 20 April s.d. 20 Juni 2021
Dengan Ketentuan :	
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan yang bersangkutan.	
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan tersebut diatas.	
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Bupati Lampung Selatan c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.	
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas, dan Surat Asli Izin Penelitian akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah <i>Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian/Praktis/Resit/KKN/KKL</i> .	
<div style="text-align: right;">Dikeluarkan di Kalianda Pada tanggal <u>20 April 2021</u> a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</div> <div style="text-align: center;"> THOMAS AMIRICO, S.STP. MH Pembina Tk. I NIP. 19800715 199912 1 002</div>	
TEMBUSAN Yth, 1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan) 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan 3. Kepala Desa Talang Baru Kec. Sidomulyo 4. Rektor UIN Raden Intan Lampung Cq. Dekan Fakultas Syariah	

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najib Effendy

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pemilik Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 20 April 2021
Narasumber

Muhammad Najib Effendy

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzat Sudrajat

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Manager

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 20 April 2021
Narasumber

Azzat Sudrajat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Kurniawan
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Kepala Buruh/mandor

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Asep Kurniawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopian Basri

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Kepala Buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Nopian Basri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwanda
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Kepala Buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Suwanda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kuswandi

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Kuswandi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Abdul Hakim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kliwon
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Kliwon

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aziz
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Nur Aziz

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maysaroh

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Maysaroh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leti
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Leti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Aditya

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Saputra

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah

Npm : 1721030314

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Ridwan Saputra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Sari
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Ani Sari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : pekerja/buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Latifah
Npm : 1721030314
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Secara Borongan (Studi Pada Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Narasumber

Fatimah

PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dengan pemilik Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan

1. Sudah berapa lama bapak mempunyai usaha rumah pemotongan ayam ini?
2. Bagaimanakah sejarah berdirinya perusahaan ini sehingga terbentuknya perusahaan hingga saat ini?
3. Bagaimanakah struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan ini?
4. Ada berapakah pekerja yang bekerja di perusahaan ini?
5. Bagaimana sistem perusahaan yang terjadi di perusahaan ini?
6. Apakah pernah ada masalah atau keluhan dari pekerja/buruh terkait upah yang didapatkan mereka?
7. Bagaimana pendapat bapak terkait pemberian upah yang tidak sesuai terhadap para pekerja/buruh?

**Pertanyaan wawancara dengan manager pada Rumah Pemotongan Ayam
Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan**

1. Sudah berapa lama bapak bekerja disini?
2. Bagaimana menurut bapak mengenai sistem upah di perusahaan ini?
3. Apakah penghasilan yang di dapat sudah memenuhi kebutuhan?
4. Apakah ada masalah atau keluhan para pekerja/buruh terkait sistem upah di perusahaan ini?
5. Bagaimana pendapat bapak, apabila terjadinya ketidakadilan para pekerja/buruh dalam hal pemberian upah?

**Pertanyaan wawancara dengan kepala buruh pada Rumah Pemotongan
Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung
Selatan.**

1. Sudah berapa lama bapak bekerja disini?
2. Apa saja kendala atau kesulitan selama melakukan pekerjaan ini?
3. Apakah ada keluhan dari pekerja/buruh terkait upah yang diberikan?
4. Bagaimana menurut bapak, jika ada seorang pekerja/buruh yang menuntut upah yang seharusnya mereka dapatkan?
5. Apakah pemberian upah yang diberikan bapak kepada pekerja/buruh sudah sesuai dengan perjanjian di awal bekerja?

Pertanyaan wawancara dengan pekerja/buruh pada Rumah Pemotongan

Ayam Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Selatan

1. Sudah berapa lama bapak bekerja disini?
2. Mengapa bapak ingin bekerja disini dan bertahan bekerja disini?
3. Bagaimana menurut bapak mengenai sistem upah yang diberikan di perusahaan ini?
4. Apakah penghasilan bapak bekerja disini sudah memenuhi kebutuhan?
5. Apakah ada keluhan selama bekerja disini terkait pemberian upahnya?
6. Bagaimana pendapat bapak terhadap pemberian upah yang tidak sesuai?

Lampiran 4. Dokumentasi



Wa

wawancara dengan pemilik Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru



Wawancara dengan kepala buruh Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru



Wawancara dengan buruh borongan Rumah Pemotongan Ayam Desa Talang Baru



Skripai_Mutiara Latifah

by Mutiara Latifah

Submission date: 11-Oct-2021 03:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1670934047

File name: muteee_bisaa.docx (130.5K)

Word count: 13328

Character count: 84981

Skripai_Mutiara Latifah

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pa-kalianda.go.id Internet Source	1 %
2	psq.or.id Internet Source	1 %
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
4	listrikgrosir.blogspot.com Internet Source	1 %
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
6	anggunmedia.blogspot.com Internet Source	1 %
7	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
8	www.gajimu.com Internet Source	1 %
9	jurnal-agriba.info Internet Source	1 %

10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
11	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
12	Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	1 %
13	nengiyeng.blogspot.com Internet Source	1 %
14	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
15	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
16	pukspl-fspm-cgpsi.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	pianohidup.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

20	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
21	Akhmad Bazith. "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Mau>d}u>'i>)", Jurnal Ilmiah Islamic Resources, 2019 Publication	<1 %
22	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
24	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.murti.web.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.scribd.com Internet Source	<1 %
27	dhonykampoebiroe.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
29	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
iztie22.blogspot.com		

30	Internet Source	<1 %
31	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
32	caturraca.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	docplayer.info Internet Source	<1 %
34	gustani.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	www.servyoutube.com Internet Source	<1 %
36	vanblackmoor.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	www.banksoalanspm.com Internet Source	<1 %
38	isra.my Internet Source	<1 %
39	nasional.tempo.co Internet Source	<1 %
40	Masadah -. "HADHANAH DALAM PRESPEKTIF IMAM MADHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP	<1 %

PENDIDIKAN ANAK", DINAMIKA : Jurnal Kajian
Pendidikan dan Keislaman, 2020

Publication

41	edoc.pub Internet Source	<1 %
42	entrepreneurship-succes.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	anzdoc.com Internet Source	<1 %
44	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
45	core.ac.uk Internet Source	<1 %
46	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
47	es.scribd.com Internet Source	<1 %
48	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
49	Submitted to Universitas Teuku Umar Student Paper	<1 %
50	media.unpad.ac.id Internet Source	<1 %

51	Zainal Arifin. "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
52	Nisa Lusiana, Afif Muamar, Wasman Wasman, Didi Sukardi. "PRAKTIK TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 Publication	<1 %
53	celillesmana.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	documents.mx Internet Source	<1 %
55	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
56	123dok.com Internet Source	<1 %
57	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
58	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
59	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %

60	g-wk.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
62	tifbr-tazkia.org Internet Source	<1 %
63	bobbyfebe.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
65	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
66	globalpers.id Internet Source	<1 %
67	id.123dok.com Internet Source	<1 %
68	id.scribd.com Internet Source	<1 %
69	jom.unri.ac.id Internet Source	<1 %
70	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

72	stay-control.xyz Internet Source	<1 %
73	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
74	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
75	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
76	bphn.go.id Internet Source	<1 %
77	cszoel.wordpress.com Internet Source	<1 %
78	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
79	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
80	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
81	putaria.biz Internet Source	<1 %
82	www.kodam-mulawarman.mil.id Internet Source	<1 %
83	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %

84	Kadek Agus Sudiarawan, Putu Ade Hariestha Martana. "IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELAKU USAHA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI", <i>Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum</i> , 2019 Publication	<1 %
85	Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", <i>Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam</i> , 2019 Publication	<1 %
86	Rahmad Hidayat. "Nilai-Nilai Psiko-Edukatif Dalam Surat Al-'Ashar: (Pembacaan Kritis Atas Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)", <i>Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam</i> , 2017 Publication	<1 %
87	animarlinastkipkusumanegarajakarta.wordpress.com Internet Source	<1 %
88	id.wikisource.org Internet Source	<1 %
89	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %